

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

TAHUN 2021



DINAS PPKUKM
PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Mekanisme pelaporan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Puji syukur juga kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada tahun 2021 Dinas PPKUKM DKI dapat kembali berinovasi dan berkolaborasi sehingga terwujudnya penyediaan akses informasi yang transparan dan terbuka.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih

Jakarta, Februari 2022

Kepala Dinas Peindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta



Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP 197009241998032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I.GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	1
A. Kebijakan	1
B. Sarana dan Prasarana	2
II.GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK	4
A. Pelayanan Informasi Publik	4
B. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah.....	4
1. PPID Provinsi DKI Jakarta Selaku PPID Utama (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik).....	4
2. PPID Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Selaku PPID Pembantu	5
C. Hasil Evaluasi Dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Daerah Oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia	17
III. SARAN DAN KESIMPULAN	18

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

Tahun 2021 seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal pembatasan jarak fisik. Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi prioritas demi terciptanya herd immunity. Meskipun pandemi telah mengharuskan perkantoran melaksanakan bekerja dari rumah (WFH), Pemprov DKI Jakarta tetap melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun, Pemprov DKI Jakarta juga mengoptimalkan

layanan berbasis daring (online) melalui website dan aplikasi yang telah dibuat. Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

Selama masa pandemi COVID-19 publik juga berhak tahu perkembangan kasus COVID-19 di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk selalu transparan dan menyampaikan seluruh data serta informasi yang dikelola melalui kanal-kanal yang dimiliki, agar Publik juga lebih waspada serta ikut bertindak dan berpartisipasi dalam menghadapi pandemi. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta juga membangun sebuah sistem yang terintegrasi untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi, serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling mengulurkan bantuan kepada masyarakat lain yang terdampak pandemi, serta menyebarluaskan informasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di DKI Jakarta.

B. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Pembantu dan PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - Kursi tamu;
 - Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - 1 (satu) unit lemari arsip; dan
 - 1 (satu) filling kabinet.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui e-mail disppkukm@jakarta.go.id atau ppid@jakarta.go.id;
3. Website resmi PPID Pembantu Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta dapat diakses pada url <https://disppkukm.jakarta.go.id/> pada menu PPID. Kanal PPID Dinas PPKUKM terdiri dari beberapa sub menu yaitu :
 - a. Profil PPID Dinas PPKUKM
 - b. Maklumat Informasi

- c. Permohonan Publik
 - d. Keberatan Informasi
 - e. Daftar Informasi Publik Tersedia
 - f. Informasi Serta merta
 - g. Informasi berkala
 - h. Informasi Setiap Saat
 - i. Whistle Blowing
 - j. Kanal Pengaduan
 - k. Standar Layanan
4. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui url/ link: <http://ppid.jakarta.go.id>. Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:
- Sub menu profil (Pemprov DKI Jakarta dan PPID Provinsi DKI Jakarta);
 - Sub menu informasi publik (daftar informasi publik, informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat);
 - Sub menu standar layanan informasi (prosedur pelayanan informasi publik, prosedur pengelolaan keberatan informasi publik, prosedur permohonan penyelesaian sengketa informasi, prosedur penanganan sengketa informasi, SOP PPID, kanal layanan informasi, waktu dan biaya layanan, dan maklumat informasi publik);
 - Sub menu Berita (berita seputar Jakarta dan berita PPID);
 - Sub menu laporan (laporan Pemprov DKI Jakarta dan laporan tahunan pelayanan informasi PPID);
 - Sub menu galeri (foto dan video); dan
 - Sub menu kontak kami (informasi terkait alamat/ lokasi layanan PPID Provinsi DKI Jakarta).
5. Aplikasi pelayanan informasi berbasis mobile apps juga telah bisa digunakan oleh masyarakat dengan mengunduh aplikasi PPID pada Play Store (Android) dan Apps Store (iOS).

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021 dan selama Pandemi Covid-19, pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga masih disediakan secara langsung dengan protokol kesehatan yang ketat di PPID Provinsi dan PPID Perangkat Daerah melalui desk/ meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website PPID, dan Mobile Apps PPID.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Provinsi DKI Jakarta akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara langsung/ tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Selanjutnya, apabila permohonan informasi publik disampaikan secara online melalui portal/ website PPID dan Mobile Apps, maka formulir diisi secara langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi akan memeriksa status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Provinsi maupun pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Apabila terdapat informasi yang diberikan melewati batas waktu/ jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

B. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Provinsi dan PPID pada Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah

1. PPID Provinsi DKI Jakarta Selaku PPID Utama (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik)

Sepanjang tahun 2021, PPID Provinsi DKI Jakarta telah memberikan pelayanan informasi kepada 600 pemohon informasi publik, dengan rincian sebanyak 566 pemohon informasi

individu (perseorangan) dan 34 pemohon informasi berbentuk lembaga/ badan hukum. Selain itu pemohon yang menyampaikan permohonan informasi dengan cara mendatangi langsung desk pelayanan informasi sebanyak 18 pemohon, melalui portal/website PPID <http://ppid.jakarta.go.id> sebanyak 531 pemohon, dan melalui mobile apps sebanyak 51 pemohon.

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh permohonan informasi publik tersebut, terdapat sebanyak 588 pemohon informasi yang telah menerima jawaban permohonan sesuai dengan keseluruhan rincian informasi yang dibutuhkan, terdapat 1 (satu) permohonan informasi yang ditolak karena termasuk informasi yang dikecualikan, dan 11 permohonan informasi yang tidak dapat ditindaklanjuti karena pemohon informasi tidak melengkapi persyaratan pengajuan permohonan informasi publik. Adapun waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan informasi publik adalah selama 9 (sembilan) hari kerja.

2. PPID Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Selaku PPID Pembantu

PPID Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan tugas dan fungsi monitoring evaluasi serta merekapitulasi laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Data rekapitulasi didapatkan dengan berkoordinasi secara langsung dan melalui media elektronik dalam periode berkala.

Rekapitulasi laporan pelayanan informasi publik tahun 2021 yang disampaikan oleh PPID Perangkat Daerah tersebut juga dapat diuraikan berdasarkan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tanggal	Nama	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yang diminta	Tujuan penggunaan informasi	Keputusan	Tanggal pemberian informasi	Cara permohonan	Kategori permohonan	Status	Topik
1	07-01-2021 10:37:18	Reni rahayani	'087885 648151	Wirausaha	Modal usaha dagang	Untuk bikin umkm	diterima	11-01-2021 09:24:27	online	Perorangan	Selesai	UMKM
2	10-01-2021 14:59:14	Ira Amalia	'083890 777948	Mahasiswa	1. Jumlah UKM DKI Jakarta pada periode tahun 2015-2020 2. Jumlah UKM Jakarta Timur pada periode 2015-2020 3. Perkembangan laba UKM Jakarta Timur 4. Jumlah penjualan UKM Jakarta Timur	Pengolahan data tugas akhir perkembangan dan keberhasilan usaha pada UKM DKI jakarta timur	diterima	18-01-2021 15:26:51	online	Perorangan	Selesai	UMKM
3	10-01-2021 20:33:33	ricki irawan	'085773 533421	wirausaha	Bikin umkm	Untuk modal usaha	diterima	11-01-2021 13:56:09	online	Perorangan	Selesai	UMKM
4	20-01-2021 10:55:10	Ira Amalia	'083890 777948	Mahasiswa	1. Rekap data ukm tahun 2020 2. Rekap data ukm tahun 2019 berdasarkan sektor usaha 3. Rekap data ukm 2019 berdasarkan tenaga kerja, omset, dan skala	Permohonan data untuk penyelesaian skripsi yang berjudul pengaruh kreativitas dan keterampilan terhadap keberhasilan usaha pada usaha kecil dan menengah di DKI Jakarta	diterima	26-01-2021 16:56:58	online	Perorangan	Selesai	UMKM

5	12-03-2021 21:44:25	Nila Kurnia Wati	'081554 611133	Dosen Politeknik STIA LAN Jakarta	1. Jumlah usaha mikro di DKI Jakarta tahun 2020 2. Rata-rata pendapatan usaha mikro DKI Jakarta 2020 3. Kontribusi UMKM terhadap pendapatan daerah tahun 2020 4. Jumlah usaha mikro yang diusulkan menerima banpres produktif tahun 2020 5. Jumlah usaha mikro penerima banpres 2020 6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas PPKUMK tahun 2020	Penunjang penelitian	diterima	07-04-2021 16:09:54	online	Perorangan	Selesai	Perdagangan
6	17-03-2021 08:08:20	Siti Maysaroh	'081211 515465	Mahasiswi	Ingin meminta data populasi UMKM di Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat	Untuk data skripsi dengan judul "Pengaruh Peer To Peer Lending (P2P) dan Payment Gateway Terhadap Kinerja UMKM Di Era COVID-19 Dengan E-commerce Sebagai Variabel Moderating"	diterima	31-03-2021 15:00:04	online	Perorangan	Selesai	Perdagangan
7	18-03-2021 13:04:00	Ira Amalia	'083890 777948	Mahasiswa	Data pengelompokan UMKM per enam wilayah kota administrasi Provinsi DKI Jakarta pada	Memenuhi tugas akhir tentang pengaruh kreativitas dan	diterima	12-04-2021 14:53:45	online	Perorangan	Selesai	Perdagangan UMKM

					tahun 2016,2017,2018	keterampilan terhadap keberhasilan usaha						
8	18-03-2021 13:07:20	Ira Amalia	'083890 777948	Mahasiswa	Data pengelompokan ukm per kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2016,2017,2018,201 9,2020	Memenuhi data penelitian tugas akhir tentang pengaruh kreativitas dan keterampilan terhadap keberhasilan usaha	diterima	12-04-2021 14:52:16	online	Perorangan	Selesai	Perdag angan UMKM
9	31-03-2021 21:40:19	Intan muthia	'081383 770631	Ibu rumah tangga - mahasiswa	Imformasi yang dibutuhkan 1. Jumlah industri tempe rumahan/ pengrajin tempe yang ada disetiap kelurahan/kecamata n dijakarta barat. 2. Jumlah industri tempe rumahan/pengrajin tempe dijakarta barat digolongkan berdasarkan jenisnya apakah termasuk industri kecil, sedang atau besar.	Untuk data yang akurat dalam penyusunan skripsi	diterima	23-04-2021 15:50:11	online	Perorangan	Selesai	Usaha Kecil
10	09-04-2021 13:01:13	Shabrina Nur Azizah	'085814 313356	Mahasiswa	Jumlah UMKM tiap kecamatan di Jakarta Barat	Untuk keperluan data Tugas Akhir	diterima	15-04-2021 12:13:15	online	Perorangan	Selesai	UMKM

11	10-04-2021 10:57:12	Amelia pasaribu	'082114 936250	Mahasiswa di UPNVJ	Permohonan meminta data UMKM Kelurahan Gedong sebagai data yang akan dikelola untuk riset penelitian saya sebagai persyaratan skripsi. Dimana riset penelitian saya terkait faktor faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku keuangan UMKM di Kelurahan Gedong. Dengan faktor faktor sebagai berikut seperti literasi keuangan, pendapatan dan sikap keuangan.	Sebagai data populasi dan sampel dalam riset penelitian saya(skripsi) serta sebagai bukti lampiran atau data yang akan dikelola dalam riset penelitian saya	diterima	26-04-2021 09:11:04	online	Perorangan	Selesai	UMKM
12	12-04-2021 07:48:02	Amelia pasaribu	'082114 936250	Mahasiswa di UPNVJ	Meminta izin informasi nama penerima UMKM ,berapa jumlah UMKM, beserta data detail UMKM	Saya sedang melakukan riset penelitian terkait UMKM. Dimana riset tersebut meneliti terkait perilaku keuangan UMKM diperngaruhi oleh faktor literasi keuangan, pendapatan dan sikap keuangan	diterima	26-04-2021 09:18:05	online	Perorangan	Selesai	UMKM

13	13-04-2021 11:50:58	Amelia Pasaribu	'082114 936250	MAHASIS WA UPNVJ	Berapa umkm yang ada di Kelurahan Gedong, berapa jumlah umkm dikecamatan pasar rebo, rincian detail umkm yang ada di kelurahan Gedong(nama umkm, nik, alamat dll)	saya sedang melakukan riset penelitian berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan UMKM Kelurahan Gedong dimana variabel faktornya ialah literasi keuangan, pendapatan dan sikap keuangan.	diterima	26-04-2021 09:38:29	mobile	Perorangan	Selesai	UMKM
14	18-04-2021 11:06:14	Cheeny Eillen	'083817 161349	Mahasiswi	Data UMKM bidang fashion di ITC Cempaka Mas / di kelurahan sunter agung	Data tersebut akan dipakai untuk penyusunan proposal skripsi	diterima	29-04-2021 14:02:05	online	Perorangan	Selesai	UMKM
15	21-04-2021 00:23:04	Yuda Rian Bahari	'081324 672150	PNS BAPENDA Prov.DKI Jakarta	Saya membutuhkan data penunjang guna melengkapi penyusunan skripsi saya berupa data: 1. Jumlah umkm dijakarta selatan, 2. Target penyaluran KUR dijakarta selatan, 3. Realisasi KUR dijakarta selatan.	Untuk penyusunan Skripsi	diterima	07-05-2021 14:44:18	online	Perorangan	Selesai	UMKM
16	21-04-2021 18:08:52	Ardo ahmad bahtiar	'088293 586598	Mahasiswa	Data Jumlah umkm yang ada di kelurahan sunter agung dan	Data akan digunakan untuk kepentingan	diterima	29-04-2021 14:02:16	online	Perorangan	Selesai	UMKM

					Data jumlah umkm yang ada di kecamatan Tanjung Priok	akademis yaitu penulisan karya ilmiah						
17	09-05-2021 13:19:46	Agung Dhamar Kencana	'085894 381552	Mahasiswa	Rencana kebutuhan BMD Dinas PPKUKM DKI Jakarta TA 2019 Rencana kebutuhan BMD Dinas PPKUKM DKI Jakarta TA 2020	Digunakan untuk penelitian tugas akhir kuliah	diterima	21-05-2021 15:25:26	online	Perorangan	Selesai	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18	21-05-2021 21:17:10	Amirafique Rasyida Basmah Faizin	'087780 462526	Mahasiswa	Jumlah dan sebaran jenis UMKM yang menerima BLT UMKM dalam bentuk Banpres Produktif selama tahun 2020	Sebagai data untuk penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan akademis	diterima	07-06-2021 13:51:10	mobile	Perorangan	Selesai	UMKM
19	23-05-2021 01:23:49	MARI ROSMARI NI	'081219 386348	IBU Rumah tangga	untuk mendapatkan dana dari pemerintah bpumkm tahun ini	untuk bisa mengecek apakah saya bisa terdaftar di bpumkm tahun ini	diterima	16-06-2021 13:34:18	online	Perorangan	Selesai	UMKM

20	02-06-2021 11:52:06	Safira Azka Tazkiyatulla ili	'081584 484604	Mahasiswa	Selamat Siang, Disppukm DKI Jakarta. Perkenalkan, Saya Azka, salah satu mahasiswi Politeknik Ketenagakerjaan. Saat ini saya sedang menempuh tugas akhir yang bertemakan Upah Pekerja Coffee Shop. Berhubung saya berencana melakukan penelitian untuk Coffee Shop di daerah Jakarta, maka saya memerlukan data terkait jumlah coffee shop di masing- masing Kab/Kota Provinsi DKI Jakarta dan (jika memungkinkan juga) contact person coffee shop-coffee shop tersebut. Apakah kiranya Disppukm DKI Jakarta dapat membantu saya untuk memberikan data dan informasi yang saya butuhkan? Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila saya mengganggu. Sangat ditunggu responnya???	Tugas Akhir	diterima	21-06-2021 12:29:14	online	Perorangan	Selesai	KUMK MP
----	------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------	---	-------------	----------	------------------------	--------	------------	---------	------------

21	15-06-2021 14:42:32	Siti Maysaroh	'081211 515465	Mahasiswi	Data mengenai perkembangan kinerja UMKM Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat tahun 2016 - 2021	Untuk kepentingan kelengkapan data skripsi yang berjudul "Pengaruh Peer To Peer Lender dan Payment Gateway terhadap Kinerja UMKM Selama Pandemi Covid-19 yang Di Moderasi Oleh E-commerce"	diterima	28-06-2021 13:46:58	online	Perorangan	Selesai	UMKM
22	29-06-2021 10:23:13	Cornelis M Manuputty	'628129 3348251	Perja harian lepas	Program Bantuan BPUM eform BRI yang tidak dapat saya cairkan Karen nama yang tertera bukan nama saya tetapi Nomor NIK milik saya.	Ingin mengetahui mengapa data diri pribadi saya yang valid bisa berubah atas nama orang lain	diterima	15-07-2021 14:51:00	online	Perorangan	Selesai	UMKM
23	03-07-2021 20:28:23	Renny Fitriyana	'081584 572627	Mahasiswa	1. Data UMKM yang terdaftar di wilayah Cempaka Putih 2. Data UMKM yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Cempaka Putih 3. Data UMKM orang pribadi dan badan di wilayah Cempaka Putih 4. Data UMKM yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta 5. Data UMKM yang terdaftar di wilayah	Dalam rangka penelitian/penu lisan skripsi guna mendapat gelar S1	diterima	28-07-2021 05:15:30	online	Perorangan	Selesai	UMKM

					DKI Jakarta 6. Data UMKM orang pribadi dan badan di wilayah DKI Jakarta							
24	05-07-2021 11:23:24	Arie Widya Hapsari	'089653 770909	Mahasiswa	Data Jumlah Industri Sedang dan Besar wilayah DKI Jakarta Tahun 2015-2021	Penelitian Tugas Akhir	diterima	21-07-2021 13:42:36	online	Perorangan	Selesai	Perindustrian
25	09-08-2021 11:21:05	MARI ROSMARI NI	'081904 384464	IBU Rumah tangga	IUMK(120835/P.1/31 .74.01.1005.01.008. R.4/4/- 1.828.2/e.r/2020	Untuk mendapatkan dana bpumkm dan daftar online lumk	diterima	16-08-2021 11:10:39	online	Perorangan	Selesai	UMKM
26	28-08-2021 14:06:43	thalita ragillula	'081383 360137	Mahasiswa	Ingin mengetahui jumlah UMKM yang terdapat di PTSP UKM Jakarta Barat.	untuk melakukan penelitian skripsi dalam mencari jumlah populasi sampel yang ada	diterima	13-09-2021 12:11:59	online	Perorangan	Selesai	UMKM
27	24-09-2021 07:01:16	Rheina Ayu Efita Putri	'081287 749494	Mahasiswa	- Data Penerima Jakpreneur di Jakarta Barat - Angka Pengangguran Tertinggi dan Terendah di wilayah kecamatan di Jakarta Barat	Data Rujukan Penelitian Mata Kuliah Politik Perkotaan	diterima	07-10-2021 14:42:02	online	Perorangan	Selesai	KUMK MP

28	25-09-2021 13:36:18	Ira Amalia	'083890 777948	Mahasiswa	Data Peserta UMKM Tahun 2018 Kota Administrasi Jakarta Timur , kolom nama alamat kelurahan kecamatan tahapan omset tenaga kerja nama usaha jenis usaha dst	Permohonan data untuk penyelesaian skripsi yang berjudul pengaruh kreativitas dan keterampilan terhadap keberhasilan usaha pada usaha kecil dan menengah di DKI Jakarta	diterima	11-10-2021 14:24:54	online	Perorangan	Selesai	UMKM
29	23-10-2021 08:14:09	PT. Ayaskara Nisita Synergy	'025183 30717	Jasa Konsultansi (Bisnis, Manajemen, Adm.Perdagangan, Pertanian, Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja)	Data profile UMKM per kelurahan/kecamatan/kota madya di DKI Jakarta. Yang meliputi jenis usaha, aset, keunggulan, volume penjualan, jumlah anggota.	Analisis Pemulihan Ekonomi Jakarta	diterima	15-11-2021 12:13:47	online	Lembaga / Organisasi	Selesai	UMKM
30	16-12-2021 12:10:12	Nadhif Muhamad Fauzan	'081285 361223	Mahasiswa	Jumlah UMKM DKI Jakarta dari tahun 2018-2021	Penelitian skripsi	diterima	10-01-2022 14:54:37	online	Perorangan	Selesai	UMKM

31	20-12-2021 14:41:33	Azkiya Himayatu Dini	'089656 108176	Mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Data jumlah P1-P7 dan klasifikasi Usaha Program Jakpreneur Per- Desember 2021 Berdasarkan Wilayah Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan • Data jenis usaha UMKM di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Wilayah Kota • Data jumlah UMKM aktif di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Wilayah Kota • Data potensi bidang usaha UMKM peserta jakpreneur di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Wilayah Kota 	Penelitian Skripsi	diterima	11-01-2022 11:23:10	online	Perorangan	Selesai	UMKM
----	------------------------	----------------------------	-------------------	-----------	---	--------------------	----------	------------------------	--------	------------	---------	------

C. Hasil Evaluasi Dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemerintah Daerah Oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Setiap tahun Komisi Informasi Pusat RI menyelenggarakan Penilaian melalui metode Kuesioner Penilaian Mandiri. Seluruh Badan Publik diminta untuk mengisi beberapa lembar formulir kuesioner sebagai bahan penilaian, pemeringkatan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Pada tahun 2021, Komisi Informasi Pusat RI membagi dua tahapan penilaian menjadi dua termin verifikasi. Termin pertama berupa pengisian kuesioner Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 yang dikirimkan kepada Komisi Informasi Pusat RI melalui Aplikasi E-Monev paling lambat tanggal 9 Agustus 2021 dan tahapan selanjutnya adalah penyampaian video presentasi monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 15 September 2021 dan tahapan presentasi Badan Publik pada tanggal 11 Oktober 2021 yang menitikberatkan kepada penilaian tentang komitmen, kolaborasi, dan inovasi Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan keseluruhan hasil tahapan penilaian yang diikuti oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka pada pengumuman hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Badan Publik pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan total nilai 96,40 dengan hasil kualifikasi "informatif". Penyerahan penghargaan Keterbukaan Informasi Publik diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Komisi Informasi Pusat RI di Istana Wakil Presiden RI pada tanggal 26 Oktober 2021. (foto penyerahan penghargaan dan sertifikat pada lampiran).

D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PPID Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah juga masih belum sepenuhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan

perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;

3. Pemahaman dan pengetahuan yang sangat minim dari petugas dan pemangku kepentingan pada sekolah-sekolah negeri di Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga banyak permohonan informasi yang diajukan ke Sekolah-sekolah negeri tersebut belum dijawab secara maksimal;
4. Keterlibatan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah juga masih belum maksimal dalam penanganan keberatan dan sengketa informasi publik karena kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul;
5. Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik; dan
6. Masih kurangnya respon masyarakat dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan juga masih adanya berbagai organisasi masyarakat yang memanfaatkan Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

III. SARAN DAN KESIMPULAN

Untuk melengkapi seluruh daftar informasi publik (DIP) dan dokumen informasi publik yang berada di bawah kewenangan PPID Provinsi DKI Jakarta, maka diharapkan seluruh PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah tetap mengelola dan memutakhirkan DIP secara berkala dan melaksanakan penginputan pada sistem yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku PPID Provinsi DKI Jakarta dan dibantu oleh Dinas PPKUKM sesuai dengan ketentuan yang tersedia dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasi dengan baik.

Selanjutnya, diharapkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menginformasikan seluruh informasi publik tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan good governance dan open government.

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah

terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik dalam mengelola Daftar Informasi Publik dan pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan, keterlibatan dalam setiap penyelesaian sengketa informasi publik yang melibatkan Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait, serta pengadaan sarana dan prasarana dalam menjalankan, mengelola, dan melakukan pelayanan informasi publik melalui PPID.